



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

Amiruddin bin Muha, NIK.6405080107450013, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1945, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bebatu, RT.04, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, memilih domisili elektronik pada e-mail salmamir0404@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Tahe binti Kanda, NIK.6405084107620035, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bebatu, RT.04, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, memilih domisili elektronik pada e-mail salmamir0404@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nunukan pada tanggal 8 November 2022 dengan register perkara Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 30 November 1980 di Tawau, Malaysia;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Beddu dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Imam Jelani yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Appa (Sepupu dari Pemohon II) dan Pak Sahibe (Saudara kandung Pemohon I);
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat solat dan cincin emas seberat 7 (tujuh) gram;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama :
 - a. Sainal bin Amiruddin;
 - b. Sania binti Amiruddin;

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk



- c. Selamat bin Amiruddin;
- d. Salmah binti Amiruddin;
- e. Sohra binti Amiruddin;
- f. Sahar bin Amiruddin;
- g. Saifullah bin Amiruddin;

9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, ketika Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I / KBRI.;

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Amiruddin bin Muha) dengan Pemohon II (Tahe binti Kanda) yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 1980 di Tawau, Malaysia;
- 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dalam masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nunukan

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai hidup namun dari pernikahan siri dengan seorang wanita bernama Jae yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Kabupaten Bone dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Yasima binti Amiruddin namun anak tersebut telah meninggal dunia dan Pemohon I dengan istri terdahulunya telah berpisah 13 (tiga belas) tahun lamanya baru menikah dengan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405080107450013 atas nama Pemohon I, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 17 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405084107620035 atas nama Pemohon II, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 27 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405082702082104 atas nama Pemohon I, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 5 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yaitu;

1. Karmila Puspitasari binti Masang LK, tempat tanggal lahir Nunukan, 5 April 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Sutanto, RT.08, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan teman anak para Pemohon sejak sekitar 17 tahun yang lalu;
- bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak mengetahui terkait prosesi pernikahan tersebut namun menurut cerita anak Para Pemohon keduanya menikah di Malaysia;
- Saksi mengetahui sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keduanya merupakan muslim yang taat;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan istbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting yaitu untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Liliyanti, A.Md. binti Mustari, tempat tanggal lahir 7 Juni 1987, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Pattimura, RT.01, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan keponakan sepupu Pemohon II;
- bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak mengetahui terkait prosesi pernikahan tersebut namun setahu saksi dari cerita keluarga keduanya menikah di Malaysia;
- Saksi mengetahui sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon memiliki hubungan keluarga namun bukan saudara kandung maupun sesusuan;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keduanya merupakan muslim yang taat;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan istbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting yaitu untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi lagi sehingga Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan/ pelengkap (*suppletoire edd*);

Bahwa para Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan/ pelengkapan (*suppletoire edd*) dengan lafaz “*Wallahi, demi Allah Kami bersumpah bahwa permohonan Kami beserta alasan-alasannya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya*”;

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan nikah/ isbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, dengan demikian Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bagi pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sendiri mengenai terpenuhinya syarat-syarat dan rukun nikah menurut ajaran agama Islam, maka Hakim menilai kesaksian tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan, olehnya itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak seluruhnya terbukti dan tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut hanya baru sebagai bukti permulaan dan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan/ pelengkap (*suppletoir edd*) di muka persidangan sebagaimana putusan sela yang termuat dalam berita acara persidangan Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk. tanggal 28 November 2022;

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 30 November 1980 di Tawau, Malaysia dan sampai sekarang telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama :
 - a. Sainal bin Amiruddin;
 - b. Sania binti Amiruddin;
 - c. Selamat bin Amiruddin;
 - d. Salmah binti Amiruddin;
 - e. Sohra binti Amiruddin;
 - f. Sahar bin Amiruddin;
 - g. Saifullah bin Amiruddin;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah saudara kandung Ayah Pemohon II yang bernama Beddu dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Jelani yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Appa (Sepupu dari Pemohon II) dan Pak Sahibe (Saudara kandung Pemohon I);
- Bahwa mahar yang dibayarkan oleh Pemohon I berupa seperangkat alat solat dan cincin emas seberat 7 (tujuh) gram serta ada ijab kabul;
- bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
- bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai hidup dari pernikahan siri dan Pemohon I dengan istri terdahulunya bernama Jae telah berpisah 13 (tiga belas) tahun lamanya baru menikah dengan Pemohon II dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak melalui Kantor Urusan Agama/ KBRI setempat karena persoalan administrasi;
- bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting yaitu untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya Akta Nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan menikah, Pemohon I berstatus duda akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dan Pemohon I juga telah berpisah 13 (tiga belas) tahun dengan istri terdahulunya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan istri terdahulunya tidak memiliki kekuatan hukum sehingga Pemohon I tidak terikat hubungan yang sah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan fakta-fakta hukum tersebut, maka perkara ini telah sesuai dengan petunjuk syar'i yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in pada bab ad da'waa wal bayyinaat, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عدول وشاهدين نحوولى من وشروطه ذكرصحته امرأة على بنكاح الدعوى
وفى
الاطلاق فيه يكفي فلا مجبرة غير كانت بأن شرط ان ورضاها

Artinya:

"Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah).";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وبقبل إقرارالعاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan fatwa Majelis Hakim Ulama Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : "pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum islam) namun tanpa pencatatan lainnyadi instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharat";

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai suami mengajukan perkara isbat nikah ini bersama-sama dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti pula bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan dan pengumuman permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti adanya, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 1980 di Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Amiruddin bin Muha) dengan Pemohon II (Tahe binti Kanda) yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 1980 di Tawau, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Zuhriah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Feriyanto, S.H.I., M.H. dan Zainal Abidin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Zainal Abidin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).